

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 sebagai berikut :

#### **1. Rasio Keuangan Pada APBD**

##### **1.) Rasio Pendapatan**

- Rasio efektivitas berada dalam kriteria sangat efektif namun tidak sesuai dengan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah dengan rata-rata sebesar 102,22%.
- Rasio derajat desentralisasi berada dalam kriteria sangat kurang dengan rata-rata sebesar 8,32%, ini menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Manggarai cenderung kurang baik dalam melaksanakan otonomi daerah.
- Rasio ketergantungan keuangan daerah berada dalam kriteria sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 86,55%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Manggarai masih sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
- Rasio kemandirian keuangan daerah berada dalam kriteria rendah sekali dengan rata-rata sebesar 10,34%, hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah Kabupaten Manggarai belum mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah sehingga pemerintah Kabupaten Manggarai masih sangat tergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

- Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar -0,07%.

## 2.) Rasio Belanja

- Varians belanja menunjukkan kriteria baik dengan hasil perhitungan pada tahun 2018 Rp.42.669.876.322,00, pada tahun 2019 Rp.37.070.583.098,00 dan pada tahun 2020 Rp.62.715.394.536,87.
- Rasio pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 6,33% dan pertumbuhan belanja modal sebesar 8,72%. Pada rasio belanja menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Manggarai masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil.
- Rasio belanja operasi menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar 0,72%.
- Rasio belanja modal menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar 0,25%.
- Rasio efisiensi belanja menunjukkan kriteria sangat efisien dengan capai pada tahun 2018 0,96%, pada tahun 2019 0,95% dan pada tahun 2020 0,94%.

### 3.) Rasio Pembiayaan

Pada rasio pembiayaan daerah secara umum sudah baik terlihat dari SiLPA yang bersaldo positif dengan rata-rata sebesar Rp.51.301.115.271,77 yang memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesenambungan fiskal daerah yang baik. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai sudah tepat dalam menyajikan suatu rancangan anggaran.

### 2. Rasio Keuangan Pada Neraca

- Rasio lancar menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya dengan rata-rata sebesar 350,98.
- Rasio kas menunjukkan pemerintah kabupaten manggarai mampu membayar utang jangka pendek dengan rata-rata sebesar 72,98.
- Rasio cepat menunjukkan nilai rasio yang menurun setiap tahunnya karena dampak dari covid-19 dengan rata-rata 286,44.
- *Working capital to total assets ratio* menunjukkan posisi modal kerja neto yang cukup terhadap pembayaran utang lancar dengan total aktiva yang ada dengan rata-rata 0,03.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan saran yang dapat bermanfaat dengan berbagai kepentingan pihak yang berkepentingan. Adapun saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai

Berdasarkan perhitungan rasio keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan diharapkan lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan seperti pajak dan retribusi daerah karena cenderung tidak stabil serta melakukan pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi penyimpangan terhadap pemungutan PAD. Dengan meningkatnya pajak dan retribusi daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manggarai serta diharapkan agar lebih mengoptimalkan sumber daya yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan PAD, sehingga tingkat ketergantungan Kabupaten Manggarai terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah informasi dan memperkaya pengetahuan mengenai analisis kinerja rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. (2011). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Faud, M.R. (2016). Analisis Laporan Keuangan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

### **Jurnal :**

- Natalia, L., & Astuti, T. D. (2015). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal SosioHumaniora*, 6, 55-72.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Surakarta). *Jurnal Among Makarti*, Vol. 7 No. 13, 83-112.
- Permadi, G. A., & Hastuti, S. R. (2016). Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014. *Buletin Ekonomi*, 14 (2), 135-148.
- Rigel Nurul Fathah. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Universitas Aisyiyah Yogyakarta*.
- Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016. *Moneter*, 179-188 6(2).
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi*, 7 (1), 81-92.

**Skripsi :**

Ayu Andira. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ayu Kustia. (2018). Analisis Rasio Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gowa. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Lazyra, K. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Maemunah. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Pancasakti Tegal.

**Peraturan :**

Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan